



PERENCANAAN KOTA YANG HUMANIS

- Eko Budihardjo

**OPTIMASI PERANCANGAN LINGKUNGAN KOTA
BERKELANJUTAN BERBASIS KOMPONEN
MATAHARI, UDARA, TANAH DAN AIR**

- Agung Murti Nugroho

ALTERNATIF PENGEMBANGAN DESA MISKIN

- Agung Witjaksono

**KONSEP RUANG BERSAMA DALAM UPAYA
MEMINIMALKAN KONFLIK DAN SEGRESI
WILAYAH DI KOTA AMBON**

*- Rini Melani Salampessy, Agustina Nurul Hidayati,
dan Ida Soewarni*

**IDENTIFIKASI PENGARUH MODERNISASI
TERHADAP POLA RUANG TRADISIONAL
DI DESA TENGANAN PEGRINGSINGAN**

- I Putu Gede Sudarna, I G.P. Anindya Putra

**RENCANA PENGEMBANGAN RUTE WISATA
DI KOTA MATARAM**

- Swastining Diah Ramdhani, Hutomo Moestajib

Team Redaksi

Penanggung Jawab

Ketua Jurusan Teknik Planologi, Institut
Teknologi Nasional, Malang

Pemimpin Redaksi/Ketua Dewan Redaksi

Ir. T. Nirarta Samadhi, MSP, Ph.D

Redaktur Pelaksana

I Komang G. Santhyasa, ST

Dewan Redaksi

Ir. Ibnu Sasongko, MT

Ir. A. Nurul Hidayati, MTP

Ir. Mulyono Sadyohutomo, MCRP

Ir. Agung Witjaksono, MTP

Reviewer untuk edisi ini

Ir. Respati Wikantiyoso, MSA., Ph.D (Unmer
Malang)

Ir. T. Nirarta Samadhi, MSP., Ph.D (ITN
Malang)

Ir. Agus Dwi Wicaksono, LRR (Unibraw
Malang)

Staf Redaksi

Muhammad Reza

Muhammad Thoha

Fazar Shahfuza Akbar

Satriaddin

Yoseph D. A. B

Akhmad Andi S.

Naristi. S. Teweng

Nenny Fajarisma

Alamat Redaksi :

Journal PlanNit

(Planology - National Institute of Technology)

Jurusan Teknik Planologi,

Institut Teknologi Nasional, Malang

Jl. Bendungan Sigura-gura no.2 Malang 65145

Telp/fax. (0341) 567154

E-mail : studiopl@ftsp.itn.ac.id

Jurnal PlanNit (Planology - National Institute of Technology) adalah majalah ilmiah bidang keilmuan perencanaan dan perancangan yang berkaitan dengan penataan ruang wilayah dan kota. Jurnal PlanNit diterbitkan setiap enam bulan sekali pada bulan Juni dan Desember oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Jurusan Teknik Planologi, Institut Teknologi Nasional, Malang dengan tujuan ikut mengembangkan ilmu perencanaan dan perancangan. Redaksi menerima sumbangan artikel baik yang bersifat teoritis maupun hasil penelitian. Artikel tidak harus sejalan dengan pendapat redaksi.

Kriteria artikel yang dapat dimuat dalam Jurnal PlanNit ini:

- Hasil penelitian terapan di bidang perencanaan/perancangan (penataan ruang wilayah dan kota) atau penelitian yang ada hubungannya dengan bidang ilmu planologi.
- Pembahasan/diskusi, ringkasan sebuah buku atau artikel mengenai teori/metodologi dalam bidang keilmuan perencanaan/perancangan (penataan ruang wilayah dan kota) atau ilmu yang mendukung bidang ilmu planologi.
- Sinopsis buku terhadap buku teks planologi atau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bidang perencanaan dan perancangan (penataan ruang wilayah dan kota).

Setiap artikel yang akan dimuat dikaji substansinya oleh *reviewer* sesuai dengan bidang keahliannya. Apabila dipandang perlu, redaksi akan memohon perubahan dan/atau penyempurnaan naskah yang dikirimkan, sesuai dengan saran pandangan para *reviewer*.

Perencanaan, seperti khayalan, melukis keadaan masa depan yang diinginkan, tetapi tidak seperti khayalan, memerinci cara-cara untuk mencapainya

(Martin Meyerson)



KONSEP RUANG BERSAMA DALAM UPAYA MEMINIMALISASI KONFLIK DAN SEGREGASI WILAYAH DI KOTA AMBON

Rini Melani Salampessy

Jurusan Teknik Planologi, Institut Teknologi Nasional, Malang
Jalan Bend. Sigura-gura 2 Malang
Tlp/Fax: (0341) 567154
E-mail: rini_ms99@yahoo.com

Agustina Nurul Hidayati

Jurusan Teknik Planologi, Institut Teknologi Nasional, Malang
E-mail: karadya@telkom.net

Ida Soewarni

Jurusan Teknik Planologi, Institut Teknologi Nasional, Malang
Tlp. (0341) 346705

Abstraksi

Konflik merupakan suatu fenomena yang tidak dapat dilepaspisahkan dari sebuah negara dengan sosio kultur yang heterogen seperti di Indonesia. Konflik yang timbul tersebut diantaranya dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) bentuk yakni ketegangan antar etnik, peristiwa berlatarbelakang isu agama dan peristiwa dengan isu hubungan antar kelompok masyarakat. Konflik yang terjadi di Kota Ambon termasuk kategori konflik antar kelompok masyarakat yang pada akhirnya menjurus ke isu agama. Konflik tersebut berdampak terhadap aspek kependudukan, ekonomi, hukum, birokrasi dan pemerintahan maupun tata ruang.

Fokus utama yang dibahas di dalam penelitian ini terkait dengan dampak tata ruang akibat konflik yaitu disfungsi fasilitas-fasilitas pelayanan publik karena segregasi berdasarkan kelompok agama. Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk memberikan suatu solusi konflik, yakni konsep ruang bersama. Diharapkan bahwa ruang bersama ini nantinya bisa mengakomodir kedua kelompok dalam ruang-ruang atau zona-zona tertentu sehingga bisa meminimalisasi segregasi yang selama ini tercipta dalam kehidupan masyarakat Kota Ambon.

Kata kunci: ruang bersama, konflik antar kelompok (agama), segregasi

Pendahuluan

Kata konflik menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti perkecokan, perselisihan, pertikaian, pertentangan, benturan atau *clashi* antarmanusia. Konflik itu bisa timbul bila ada perbedaan pendapat, pandangan, nilai, cita-cita, keinginan, kebutuhan, perasaan, kepentingan, kelakuan atau kebiasaan. Konflik itu sendiri tidak semata-mata merupakan hal yang berkonotasi negatif, yaitu perpecahan kelompok. Perpecahan hanya terjadi karena perbedaan pendapat mengenai tujuan

kelompok yang tidak mencapai konsensus lagi. Perubahan selalu mencakup konflik, karena kepentingan kelompok dapat sama tetapi sering juga berbeda. (Susanto, 1998).

Dalam kehidupan sosial, terutama pada daerah pedesaan di Kota Ambon, terdapat pengelompokan masyarakat yang terdiri dari Anak Negeri Serani, Anak Negeri Salam, dan Orang Dagang. Perikat sosial antar satu kelompok dengan kelompok lainnya, berbeda-beda. Perikat sosial yang mengikat hubungan sosial Anak Negeri Serani dan Anak Negeri

Salam, antara lain yang menonjol ialah nilai-nilai budaya *Pela Gandong* yaitu perserikatan antar satu negeri di Pulau Ambon dengan satu atau beberapa negeri lain di Pulau Ambon, PP Lease dan Pulau Seram. Perserikatan tersebut didasarkan pada hubungan persaudaraan sekandung sejati, dengan isi dan tata laku perserikatan yang diatur dalam perjanjian baik lisan maupun tulisan, dimana para pihak berjanji untuk tunduk kepada perjanjian dimaksud sebagai dasar hukum bagi implementasinya dari waktu ke waktu. (Soulisa, 1996)

Kerukunan antar umat beragama di daerah seribu pulau selama ini dapat dikatakan terjalin dengan aman, meskipun peristiwa perseteruan antar kampung dan agama merupakan hal yang biasa terjadi. Perseteruan tersebut bisa terjadi di daerah Maluku Tenggara dan Maluku Tengah serta Ambon. Hal ini dimungkinkan karena biasanya satu kampung didominasi salah satu agama. Akan tetapi, kerukunan agama yang telah terjalin tersebut terkoyak karena adanya konflik antar kelompok (Islam dan Kristen) yang menjadikan sentimen agama (dan suku pendatang, khususnya pada saat kerusuhan pertama tanggal 19 Januari 1999) sebagai isu sentral.

Konflik yang melanda kepulauan Maluku selama kurun waktu ± 4 tahun ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang memiliki sumbangan signifikan terhadap terjadinya konflik sosial tersebut adalah sebagai berikut: 1) Faktor Sejarah, masuknya kolonial Portugis dan Belanda membawa sejumlah implikasi pada pembentukan struktur sosial masyarakat di Maluku termasuk di Kota Ambon, terutama terjadinya segregasi masyarakat berdasarkan agama dan suku. Akibatnya, terbentuk pola persebaran permukiman berdasarkan agama-agama. Sehingga dikenal adanya desa atau negeri Salam (Islam) dan desa/negeri Sarani (Kristen); 2) Komposisi Penduduk dan Kesenjangan Sosial Ekonomi, perbandingan jumlah penduduk antara Islam dan Kristen tidak berimbang; 3) Sentralisme Pembangunan, pemberlakuan UU No.5

tentang Pokok-pokok Pemerintahan Desa telah merubah sistem pemerintahan adat di desa-desa di Maluku termasuk Kota Ambon, dan peran elite tradisional lokal (raja-raja dan Saniri Negeri) menjadi kepala desa dan Lembaga Masyarakat Desa. (Rencana Tindak Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Pembangunan Propinsi Maluku, 2003)

Adanya konflik di suatu wilayah akan membawa dampak yang besar terhadap perkembangan kota terutama jika ditinjau dari aspek struktur tata ruang, demikian halnya dengan kondisi di Kota Ambon. Selain itu, situasi keamanan yang belum kondusif juga mendorong terbentuknya segregasi wilayah sehingga fungsi-fungsi pelayanan masyarakat terbagi menjadi dua bagian, termasuk sarana dan prasarana transportasi. Penggunaan ruang bersama semakin terminimalisasi, yang ditandai dengan adanya segregasi terhadap penggunaan fasilitas bersama seperti pasar, perkantoran, sekolah, dan rumah sakit kecuali untuk fasilitas-fasilitas yang berbasis militer. Apabila kondisi ini dibiarkan secara terus-menerus, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi segregasi pada seluruh aspek kehidupan masyarakat Kota Ambon, akibatnya penyelesaian konflik tidak akan terwujud.

Dengan demikian maka, latar belakang studi penelitian ini adalah bagaimana menciptakan suatu konsep ruang bersama yang bisa mengakomodir kepentingan kedua kelompok yang bertikai. Keberadaan ruang-ruang bersama ini memungkinkan kedua pihak untuk berbaur kembali seperti pada kondisi pra konflik. Konsep ini akan ditunjang oleh adanya zona-zona yang dapat dimanfaatkan secara bersama oleh kedua kelompok.

Landasan Teori

Landasan teori memaparkan teori inti yang diambil dan merupakan acuan pokok untuk perumusan variabel penelitian sebagai dasar pengerjaan analisis. Landasan teori yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Definisi Ruang Bersama

Definisi ruang bersama tidak jauh berbeda dengan ruang publik (*public space*). Ruang publik adalah komponen penting dalam pembangunan kota yang berfungsi sebagai wahana interaksi antar warga yang biasanya mengalami kekurangan wahana berkomunikasi. Berkaitan dengan tema penulisan, maka pengertian ruang bersama adalah ruang-ruang yang digunakan secara bersama oleh kedua kelompok (kelompok Islam dan Kristen) dalam melaksanakan aktivitasnya sehingga akan mendorong kedua kelompok untuk berbaur kembali. Ruang-ruang bersama yang dimaksud antara lain fasilitas umum, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan olahraga, sarana dan prasarana transportasi. Selain itu, penguasaan terhadap ruang-ruang bersama oleh kelompok tertentu harus ditiadakan.

Perilaku Masyarakat di Dalam Pemanfaatan Ruang

Pola keruangan yang dilihat dari kegiatan masyarakat akan membentuk ruang-ruang berdasarkan perilaku masyarakat, yaitu (Setiawan, 1995):

1. *Home Range* (Ruang Kegiatan Masyarakat)
Batas-batas umum pergerakan reguler penduduk, yang tersedia atas beberapa setting atau lokasi, serta jaringan penghubung enter setting yang diklasifikasikan menjadi *home range* harian, mingguan serta bulanan.
2. *Core Area* (Area Inti)
Merupakan batas *home range* yang paling sering dipakai, dipahami dapat secara langsung dikontrol.
3. *Territory* (Teritori)
Suatu area yang secara spesifik dimiliki dan dipertahankan, baik secara fisik maupun nonfisik (dengan aturan-aturan atau norma-norma tertentu). Teori ini biasanya dipertahankan oleh sekelompok penduduk yang mempunyai kepentingan yang sama dan saling bersepakat untuk mengontrol areanya.

4. *Jurisdiction* (Area Terkontrol)

Suatu area yang dikuasai dan dikontrol secara temporer oleh sekelompok penduduk. Oleh karena penguasanya bersifat temporer, dimungkinkan suatu area dikuasai oleh beberapa kelompok yang berbeda. Misalnya sekelompok pengojek, biasanya mempunyai *jurisdiction* tersendiri, agar tidak terjadinya berbenturan kepentingan.

5. *Personal Distance* (Ruang Personal)

Suatu jarak atau area pada intervensi oleh orang lain akan dirasakan mengganggu oleh seseorang. *Personal Distance* biasanya tidak mempunyai penampakan fisik yang jelas serta bersifat fleksibel.

Berdasarkan tema penulisan, maka perilaku masyarakat di dalam pemanfaatan ruang di lokasi penelitian terdiri dari perilaku bekerja, belajar, berbelanja, beribadah dan berkumpul. Ruang-ruang untuk kegiatan tersebut ada yang di lokasi permukiman tiap kelompok maupun di zona-zona netral.

Gejala-gejala Persepsi Lingkungan

Gejala-gejala persepsi lingkungan terdiri dari *personal space*, *privacy space* dan *territoriality space*. Berdasarkan kondisi yang ada di lokasi penelitian, maka persepsi lingkungan yang akan ditinjau di sini meliputi *private space* dan *territoriality space*. *Private space* berhubungan dengan ruang-ruang pribadi setiap kelompok misalnya tempat beribadah dan fasilitas pendukungnya, tempat berkumpul untuk kegiatan keagamaan, sedangkan *territorial space* berhubungan dengan penguasaan wilayah oleh tiap kelompok. *Territorial space* digolongkan menjadi 3 yaitu teritori primer, teritori sekunder dan teritori publik.

Defenisi Konflik dan Penyebabnya

Defenisi konflik yang digunakan berdasarkan tema penelitian adalah menurut Ramlan Surbakti yaitu bahwa konflik merupakan gejala yang serba hadir di dalam masyarakat, sehingga konflik tidak mungkin dihilangkan, melainkan hanya dapat diatur mekanisme penyelesaiannya.

Menurut Ramlan Surbakti, konflik disebabkan oleh adanya kemajemukan di dalam struktur masyarakat, baik kemajemukan kultural maupun sosial. Kemajemukan sosial dan kultural ini dikategorikan sebagai kemajemukan horizontal.

1. Kemajemukan Vertikal

Ditandai dengan struktur masyarakat yang terpolarisasi menurut pemilikan kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan. Kemajemukan tersebut memungkinkan perbedaan kepentingan di antara kelompok-kelompok masyarakat. Kemajemukan vertikal dapat menimbulkan konflik sebab sebagian besar masyarakat tidak memiliki atau hanya memiliki sedikit kekayaan dan kekuasaan.

2. Kemajemukan Horisontal

Kemajemukan horisontal kultural dapat menimbulkan konflik karena masing-masing unsur kultural berupaya mempertahankan identitas dan karakteristik budayanya dari ancaman kultur lain. Sedangkan kemajemukan horisontal sosial dapat menimbulkan konflik sebab masing-masing kelompok yang mendasarkan pekerjaan dan profesi serta tempat tinggal tersebut memiliki kepentingan berbeda bahkan saling bertentangan.

Berdasarkan uraian di atas, kemajemukan horisontal yang dimaksud di dalam penulisan ini yaitu lama tinggal, alasan tinggal, kriteria bermukim, tingkat pendidikan, mata pencaharian, dan jenis kegiatan perkumpulan. Sedangkan kemajemukan vertikal yaitu hubungan antar kelompok.

Segregasi

Segregasi merupakan usaha suatu kelompok untuk memisahkan diri dari kelompok lain, yang memiliki kebudayaan berbeda, ras yang berbeda, status sosial yang berbeda, sebagaimana yang berlaku dalam suatu masyarakat. (Bardo, John W, 1982). Segregasi yang dimaksud di dalam penulisan

ini adalah pemisahan diri antara kelompok Islam dan kelompok Kristen baik dalam aspek kependudukan, penggunaan fasilitas maupun transportasi serta penguasaan terhadap wilayah bermukim.

Teori Interaksi Sosial

Interaksi sosial merupakan hubungan antara dua atau lebih individu manusia, dimana kelakuan individu yang satu mempengaruhi, mengubah atau memperbaiki kelakuan individu yang lain atau sebaliknya. Atau dengan kata lain yaitu: hubungan timbal balik yang terjadi akibat adanya tindakan sehingga menimbulkan aksi dan reaksi. Interaksi sosial yang dimaksud di dalam penulisan ini adalah hubungan kerjasama yang akan mendukung proses pembauran antara kelompok Islam dan Kristen.

Teori Kebudayaan

Kebudayaan berasal dari Bahasa Sanskerta, "*buddayah*" yang merupakan bentuk jamak dari kata *bhudi* atau akal. Kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal. (Koentjaraningrat, 1979)

Kehidupan sosial merupakan salah satu aspek dari kebudayaan. Unsur-unsur kebudayaan menurut C. Kluckhohn dalam bukunya "*Universal Categories of Culture*" (1953) meliputi : Bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian, sistem religi dan kesenian.

1. *Bahasa*, merupakan sarana komunikasi yang paling penting dalam proses interaksi antara masing-masing individu, maupun antara kelompok-kelompok masyarakat. Selain itu bahasa juga salah satu faktor untuk menentukan hubungan kebudayaan suatu kelompok masyarakat.
2. *Sistem pengetahuan*, umumnya terjadi dalam masyarakat tradisional di mana masyarakat asli pada hakekatnya adalah masyarakat yang mempunyai kepercayaan terhadap kekuatan alam lain dalam lingkup

kehidupan mereka, yakni semacam animisme.

3. *Sistem organisasi sosial*, meliputi sistem kekerabatan, sistem komuniti, sistem pelapisan sosial, sistem politik dan sebagainya.
4. *Sistem peralatan hidup dan teknologi*, merupakan salah satu aspek yang perlu dikaji untuk dapat mengetahui tingkat peradaban yang telah berlangsung dalam masyarakat. Serta seberapa besar tingkat keterbukaan masyarakat terhadap hal-hal yang tergolong baru baginya, seperti teknologi pertanian dsb.
5. *Mata pencaharian*, perlu dikaji secara mendalam sebagai bahan untuk menganalisa tingkat kebutuhan lapangan pekerjaan bagi masyarakat serta dasar kebijakan bagi pengambil keputusan dalam menempatkan penduduk berdasarkan skill yang dimilikinya.
6. *Sistem religi*, dipandang sebagai faktor yang sangat berperan dalam bentuk dan pola penggunaan lahan, bahkan dalam masyarakat tradisional cenderung merupakan faktor yang dominan dibanding faktor-faktor lain.
7. *Kesenian*, adat istiadat, aktivitas dan peralatan fisik mengenai seni rupa, seni suara, seni sastra, seni drama, dan sebagainya.

Unsur-unsur kebudayaan yang akan dikaji di dalam penulisan ini hanya unsur bahasa, sistem organisasi sosial, mata pencaharian, sistem religi dan kesenian, dengan asumsi bahwa kelima unsur tersebut dianggap bisa mewakili karakter masyarakat kedua kelompok.

Teori Asimilasi (Pembauran)

Pembauran yang dimaksud di dalam penulisan ini adalah proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat diantara kelompok Islam dan kelompok Kristen di lokasi penelitian. Apabila orang-orang mengadakan pembauran ke dalam kelompok lain, maka mereka tidak lagi membedakan dirinya dengan kelompok tersebut, artinya ada proses identifikasi yang kuat dengan kepentingan-kepentingan serta

tujuan-tujuan kelompok. Dengan demikian batas-batas yang semula ada menjadi semakin pudar.

Teori Pola Permukiman

Menurut Michael Pacione, faktor-faktor yang mendorong permukiman mengelompok lebih banyak faktor bersifat historis (sejarah), daripada faktor-faktor modernisasi. Jika diidentifikasi terdapat enam faktor pengaruh terhadap pola permukiman mengelompok, yakni :

1. Kebutuhan mempertahankan diri dari ancaman pihak luar.
2. Ikatan kesukuan dan kekeluargaan.
3. Ada tidaknya ketersediaan air (wilayah dengan batuan permabel mendorong terjadinya pengelompokan permukiman, dimana air tersedia dalam bentuk spring atau sumur dalam).
4. Warisan atau peninggalan dari leluhurnya, dimana rumah dibangun oleh keturunannya pada tempat yang sama.
5. Ada korelasi antara permukiman mengelompok dan keadaan ekonomi yang mendasarkan pada hasil panen antara rumah petani dengan tempat bertanam berdekatan. Petani yang mendasarkan pada hasil peternakan, rumahnya berjauhan dengan tempat berternak, sehingga permukimannya cenderung menyebar.
6. Pertimbangan politis, agama, dan ideologi menyebabkan terjadinya pengelompokan penduduk perdesaan.

Faktor-faktor yang mendorong permukiman menyebar adalah sebagai berikut:

1. Ketiadaan kebutuhan untuk mempertahankan diri, hal ini didorong adanya perdamaian dan keamanan.
2. Kolonisasi oleh keluarga perintis secara individual daripada oleh kelompok karena hubungan darah atau agama.
3. Dominasi oleh pertanian dari perusahaan swasta daripada oleh komunal (bersama).

4. Bertani dalam satu blok daripada pemilikan tanah secara menyebar.
5. Suatu ekonomi pedesaan yang didominasi oleh peternakan.
6. Tanahnya berbukit atau bergunung.
7. Air tersedia dengan mudah.
8. Adanya campur tangan pemerintah untuk memisahkan perkampungan, menjalin kembali pemilikan lahan yang terpisah dan demikian pula dapat berproduksi lebih efisien.

Pembahasan

Studi Kasus: Konsep Ruang Bersama untuk Meminimalisasi Konflik dan Segregasi Wilayah

Sesuai dengan arahan dan strategi kebijaksanaan pengembangan Provinsi Maluku, maka Kota Ambon sebagai ibu kota provinsi selain berfungsi sebagai salah satu pusat aktivitas dari sistem gugus pulau di Provinsi Maluku juga berperan sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat pemerintahan provinsi, pusat pendidikan tinggi dan pusat pelayanan sosial.

Kondisi Wilayah dan Gambaran Konflik

- Jumlah penduduk Kota Ambon pada tahun 1998 (pra konflik) adalah 265.830 jiwa dan pada tahun 2002 (pasca konflik) mengalami penurunan menjadi 233.319 jiwa.
- Jumlah sarana kesehatan, peribadatan, dan perumahan mengalami penurunan drastis pasca konflik.
- Tidak ada perubahan untuk jumlah sarana pendidikan, kecuali perguruan tinggi yaitu Universitas Kristen Maluku dan Universitas Pattimura yang dibakar massa pada konflik tahap ke-2, sehingga aktivitas akademis untuk kedua perguruan tinggi tersebut hingga saat ini masih menggunakan kampus alternatif.
- Jumlah pengungsi Kota Ambon sampai akhir April 2001, baik yang berada di kamp-kamp pengungsian maupun yang sementara berada pada rumah-rumah penduduk seluruhnya berjumlah 145.328

orang. Dengan komposisi pengungsi asal Kota Ambon berjumlah 129.068 orang dan luar Kota Ambon 16.260 orang.

- Kondisi permukiman di Kota Ambon pasca konflik mengalami perubahan akibat adanya konflik. Beberapa lokasi mengalami kehancuran, dengan jumlah bangunan rumah yang hancur dan rusak 9 12.203 unit.
- Terjadi penurunan jumlah pelanggan air bersih dan listrik karena musnahnya beberapa lokasi permukiman penduduk.
- Konflik yang terjadi secara massif dan merata di berbagai wilayah Kepulauan Maluku, khususnya di Kota Ambon dapat dibagi dalam 3 (tiga) fase konflik yaitu fase I (19 Januari-April 1999), fase II (Juli - 26 Desember 1999), dan fase III 26 April 2000 - September.
- Terjadi segregasi di lokasi penelitian, yaitu pembagian *cluster-cluster* permukiman kedua kelompok (Islam dan Kristen) dan fasilitas pendukungnya berdasarkan kelompok agama.
- Adapun kawasan-kawasan potensi konflik di lokasi penelitian adalah kawasan-kawasan perbatasan Islam dan Kristen, misalnya perbatasan Batu Merah (Islam) - Mardika (Kristen), perbatasan Urimesing (Kristen) - Waihaong (Islam), perbatasan Urimesing (Kristen) - Gang Diponegoro (Islam), perbatasan Talake (Islam) - Batu Gantung (Kristen), dan perbatasan Hative Kecil (Islam) - Galala (Kristen). Kawasan-kawasan tersebut adalah kawasan yang rawan konflik, sehingga cenderung dihindari oleh masyarakat.
- Penggunaan ruang bersama oleh kedua kelompok agama semakin minim akibat konflik. Ruang bersama seperti baileo (rumah adat daerah Maluku yang sekaligus berfungsi sebagai balai pertemuan), terminal, fasilitas perkantoran, fasilitas pendidikan, fasilitas perdagangan, fasilitas kesehatan, fasilitas rekreasi dan olahraga hanya digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu saja berdasarkan keberadaan letak fasilitas. Akibatnya interaksi sosial antar kedua

kelompok agama yang bertikai semakin minim.

Konsep Ruang Bersama

Batasan konsep ruang bersama yang dimaksudkan di dalam penulisan ini adalah ruang-ruang yang bisa digunakan secara bersama oleh kelompok Islam maupun Kristen untuk berbaur kembali guna mencapai kondisi ideal seperti pada masa pra konflik. Ruang-ruang bersama yang dimaksud adalah fasilitas umum, fasilitas sosial, sarana dan prasarana transportasi. Dengan demikian, maka analisa yang digunakan terkait dengan karakter masyarakat, zona-zona pertemuan kedua kelompok, kawasan potensi konflik, intensitas potensi konflik, fleksibilitas pola ruang, perilaku ruang dan ruang bersama.

A. Analisa Karakter Masyarakat

Analisa karakter masyarakat membahas mengenai karakteristik masyarakat Islam dan Kristen berdasarkan kondisi sosial budaya, kondisi lingkungan, kondisi kemasyarakatan, dan perilaku antar kelompok Islam dan Kristen. Tujuannya adalah untuk mengetahui kebutuhan masyarakat terhadap ruang yang nantinya akan menjadi acuan untuk arahan konsep ruang bersama (Lebih jelasnya lihat tabel.1)

B. Analisa Zona-zona Pertemuan Antar Kelompok

Analisa ini bertujuan untuk mengetahui zona-zona mana saja yang menjadi tempat pertemuan antar kelompok (Lihat tabel 2)

C. Analisa Kawasan Potensi Konflik

Kawasan-kawasan potensi konflik di lokasi penelitian dapat diketahui berdasarkan karakter masyarakat tiap kelompok dan zona-zona pertemuan antar kelompok. Berdasarkan hasil analisa maka karakter-karakter yang ada pada kawasan potensi konflik di lokasi penelitian adalah sebagaimana tertera di diagram 1.

D. Analisa Intensitas Potensi Konflik

Dalam analisa ini karakter masyarakat dibagi atas dua (2) faktor, yaitu faktor horisontal dan faktor vertikal. Faktor

horisontal merupakan aktivitas produksi, sedangkan faktor vertikal merupakan aktivitas konsumtif. Aktivitas produktif terdiri dari lama tinggal tiap kelompok, alasan tinggal, kriteria bermukim, tingkat pendidikan, mata pencaharian, dan perkumpulan di lingkungan tempat tinggal. Sedangkan aktivitas konsumsi terjadi dari hubungan ketetanggaan antar agama dalam satu kampung, identifikasi ketetanggaan antar agama, sikap antar agama, hubungan kerjasama antar agama, dan sikap terhadap adat istiadat tetangga yang berlainan agama. Berdasarkan penilaian persamaan dan perbedaan karakter tersebut, maka dapat diketahui bahwa intensitas potensi konflik yang ada di lokasi penelitian termasuk kategori sedang.

E. Analisa Perilaku Ruang

Analisa perilaku ruang ini terdiri dari *private space* dan *teritorial space*. Berdasarkan hasil analisa dapat diketahui bahwa ruang-ruang privat yang ada di lokasi penelitian setelah terjadinya konflik yaitu:

1. *Cluster-cluster* permukiman tiap kelompok
Cluster-cluster permukiman tiap kelompok merupakan ruang privat dan biasanya kelompok lain tidak diperkenankan untuk masuk ke dalamnya, kecuali dengan alasan-alasan tertentu atau apabila sudah mendapat izin dari penguasa di permukiman tersebut.
2. Tempat-tempat ibadah
Tempat-tempat ibadah dan fasilitas pendukungnya tidak diperkenankan untuk dimasuki oleh kelompok lain. Apabila ada pelanggaran terhadap hal ini, biasanya menimbulkan konflik.
3. Fasilitas
Fasilitas-fasilitas yang beridentitas agama, seperti RS Al Fatah, SD Al Fattah, RS Gereja Protestan Maluku, SD Xaverius, SD Katholik, dsb masih merupakan ruang privat bagi kedua kelompok.

4. Ruang-ruang Berkumpul

Ruang-ruang berkumpul untuk kegiatan yang sifatnya keagamaan belum boleh dimasuki oleh kelompok lain.

Sedangkan *territory space* di lokasi penelitian terdiri dari:

1. Teritori Primer

- Bagi penduduk Islam maupun Kristen, teritori primer dimiliki oleh ruang-ruang peribadatan yang hanya boleh dimasuki oleh penganut agama yang bersangkutan.
- Pelanggaran terhadap teritori ini, akan ditanggapi secara serius karena hubungan antara teritori ini dengan pemiliknya sangat menyatu. Hal ini bisa menjadi pemicu konflik di lokasi penelitian.
- Yang termasuk teritori primer ini adalah:
 - Ruang-ruang untuk kegiatan organisasi kepemudaan, kewanitaan dan keagamaan.
 - Permukiman tiap kelompok
 - Ruang-ruang berkumpul di *cluster* permukiman tiap kelompok
 - Fasilitas peribadatan
 - Fasilitas umum dan fasilitas sosial yang beridentitas

agama, misalnya sekolah Islam/Kristen dan rumah sakit Islam/Kristen.

2. Teritori Sekunder

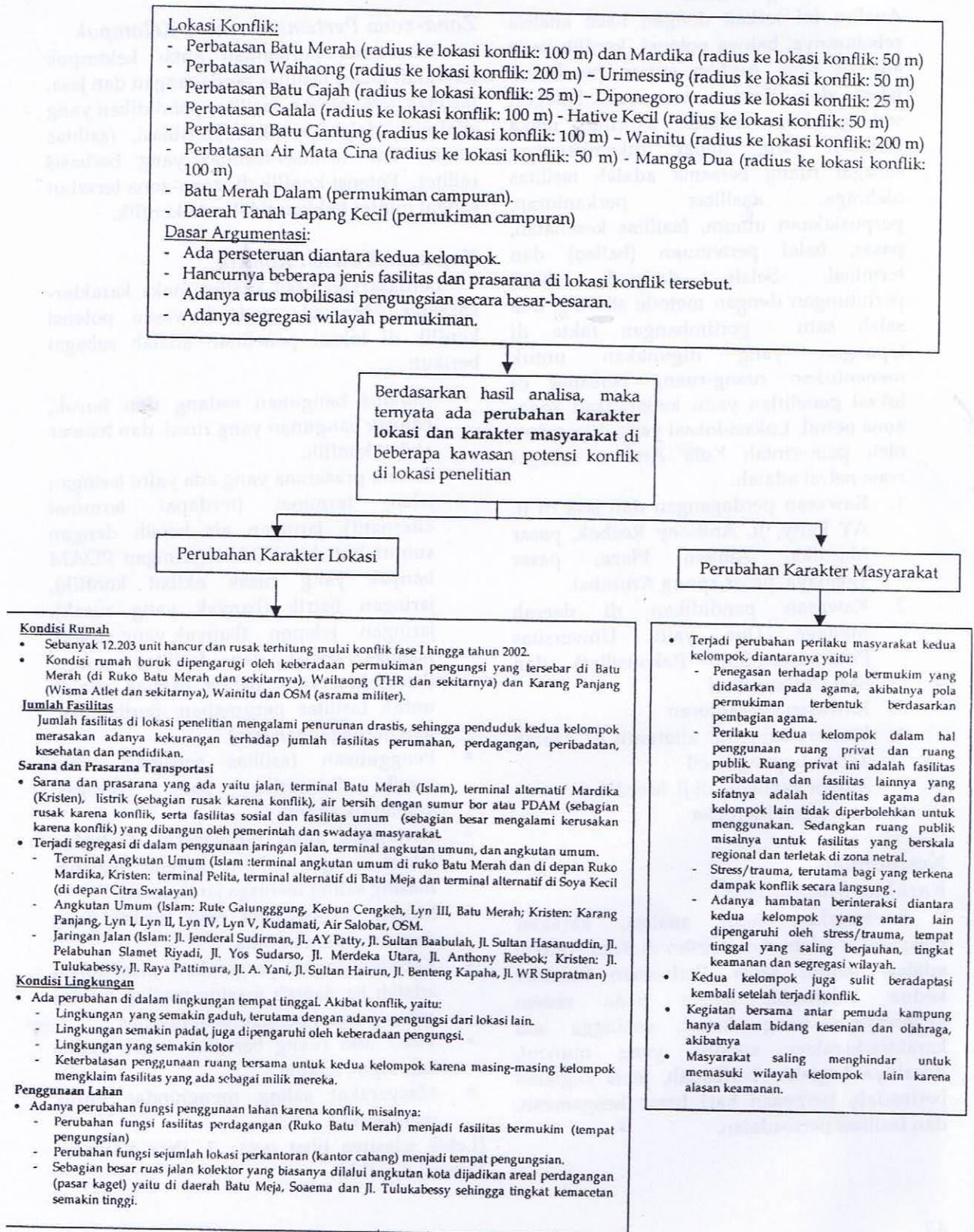
- Penguasaan teritori ini oleh tiap kelompok bersifat sekunder, sementara dan tidak dimiliki, disertai dengan pertahanan teritori yang sedang, dan tidak eksklusif, serta dilegitimasi beberapa waktu saja.
- Yang termasuk teritori sekunder ini adalah:
 - Fasilitas umum dan fasilitas sosial yang ada di permukiman kedua kelompok

3. Teritori Publik

Yang termasuk teritori publik ini adalah:

- Ruang-ruang untuk kegiatan mata pencaharian masyarakat, yaitu fasilitas perkantoran dan perdagangan.
- Fasilitas umum untuk kegiatan kesenian dan olahraga
- Fasilitas pendidikan yang terletak di zona netral, yaitu SMP Rekonsiliasi, SMU Rekonsiliasi dan Universitas Pattimura.
- Fasilitas kesehatan yang ada di zona netral yaitu Rumah Sakit Tentara

Diagram 1
Kawasan Potensi Konflik



F. Analisa Ruang Bersama

Analisa ini terkait dengan hasil analisa sebelumnya, bahwa potensi konflik yang ada di Kota Ambon antara penduduk Islam dan Kristen termasuk kategori sedang. Dari metode skoring, maka fasilitas yang dapat dikembangkan sebagai ruang bersama adalah fasilitas olahraga, fasilitas perkantoran, perpustakaan umum, fasilitas kesehatan, pasar, balai pertemuan (baileo) dan terminal. Selain daripada hasil perhitungan dengan metode skoring, ada salah satu pertimbangan fakta di lapangan yang digunakan untuk menentukan ruang-ruang bersama di lokasi penelitian yaitu keberadaan zona-zona netral. Lokasi-lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Ambon sebagai zona netral adalah:

1. Kawasan perdagangan dan jasa di Jl. AY Patty, Jl. Anthony Reebok, pasar Mardika, Ambon Plaza, pasar Tagalaya, pasar apung Arumbai.
2. Kawasan pendidikan di daerah Mangga Dua yaitu Universitas Pattimura, SMP Rekonsiliasi, dan SMU Rekonsiliasi
3. Kawasan perkantoran
4. Kantor Gubernur alternatif di daerah Tanah Lapang Kecil
5. Kantor Walikota di Jl. Merdeka
6. Lapangan Merdeka

Kesimpulan

Karakter Masyarakat

Berdasarkan hasil analisa, karakter masyarakat Islam dan Kristen di Kota Ambon adalah hampir sama. Perbedaan karakter kedua kelompok hanya pada sistem kepercayaan yang dianut, sehingga ada karakter-karakter spesifik yang muncul, misalnya kegiatan beribadah, jenis kegiatan beribadah, perayaan hari besar keagamaan, dan fasilitas peribadatan.

Zona-zona Pertemuan Antar Kelompok

Zona-zona pertemuan antar kelompok terjadi di lokasi fasilitas perdagangan dan jasa, fasilitas perkantoran, fasilitas pendidikan yang sifatnya adalah untuk rekonsiliasi, fasilitas umum dan fasilitas-fasilitas yang berbasis militer. Potensi konflik di zona-zona tersebut sangat minim bahkan tidak ada konflik.

Kawasan Potensi Konflik

Berdasarkan hasil analisa maka karakter-karakter yang ada pada kawasan potensi konflik di lokasi penelitian adalah sebagai berikut:

- Kondisi bangunan sedang dan buruk, banyak bangunan yang rusak dan hancur akibat konflik.
- Sarana prasarana yang ada yaitu jaringan jalan, terminal (terdapat terminal alternatif), jaringan air bersih dengan sumur bor dan PDAM (jaringan PDAM banyak yang rusak akibat konflik), jaringan listrik (banyak yang rusak), jaringan telepon (banyak yang rusak), fasilitas sosial dan fasilitas umum (kerusakan yang paling banyak adalah untuk fasilitas perumahan, peribadatan dan perdagangan jasa)
- Penggunaan fasilitas sebagian besar masih didasarkan pada segregasi kelompok agama
- Kerjasama antar masyarakat di kedua lokasi sangat minim karena masing-masing saling menjaga jarak sosial
- Mudah terpengaruh oleh isu-isu yang dapat memicu konflik
- Kecenderungan pergerakan masyarakat adalah ke daerah masing-masing karena ada segregasi penggunaan fasilitas
- Tidak ada ruang bersama untuk kedua kelompok agama
- Masyarakat saling menghindar untuk memasuki

(Lebih jelasnya lihat peta 1. Peta Kawasan Potensi Konflik)

Perilaku Ruang

Perilaku ruang di lokasi penelitian terdiri dari *private space* dan *territory space*. *Private space* yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah ruang-ruang pribadi setiap kelompok agama yang tidak boleh dimasuki oleh kelompok lain, misalnya *cluster-cluster* permukiman, tempat-tempat ibadah, fasilitas yang beridentitas agama dan ruang-ruang berkumpul. Pelanggaran terhadap ruang pribadi ini akan menimbulkan konflik.

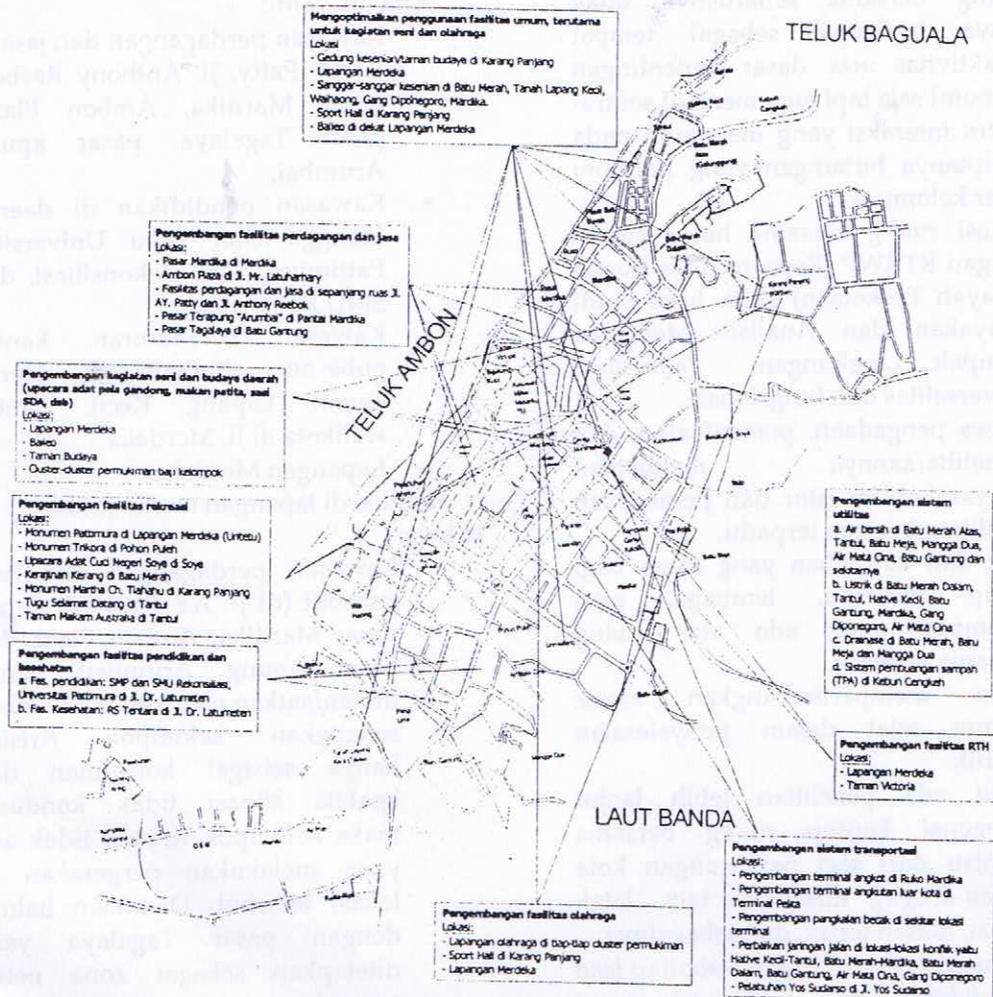
Hasil analisa menunjukkan bahwa *territory space* di lokasi penelitian terbagi atas 3 (tiga) bagian yaitu *territory primer*, *territory sekunder* dan *territori publik*. *Territori primer* adalah area-area yang sifatnya sangat pribadi bagi masing-masing kelompok agama dan hanya boleh dimasuki oleh orang-orang yang seagama atau yang sudah mendapat ijin khusus, yaitu ruang-ruang untuk kegiatan organisasi, *cluster* permukiman dan fasilitasnya yang beridentitas agama. *Territori tingkat kedua* ialah suatu area yang tidak terlalu digunakan secara eksklusif oleh kelompok agama, misalnya fasilitas umum dan fasilitas sosial yang ada di permukiman tiap kelompok. *Territori publik* adalah suatu area yang dapat digunakan atau dimasuki oleh siapapun, akan tetapi ia harus mematuhi norma-norma serta aturan yang berlaku di area tersebut, misalnya ruang-ruang untuk berdagang dan bekerja, fasilitas umum untuk kegiatan kesenian dan olahraga, fasilitas pendidikan yang ada di zona netral, fasilitas yang berbasis militer.

Ruang Bersama

Konsep ruang bersama didasarkan pada fleksibilitas pola ruang dan perilaku ruang. Berdasarkan hasil analisa, maka ruang-ruang bersama yang bisa digunakan oleh kedua kelompok agama di Kota Ambon adalah sebagai berikut:

1. Pasar lokal
2. Fasilitas perdagangan skala regional seperti Ambon Plaza dan ruko disekitarnya serta Ruko Mardika.
3. Komplek pendidikan yaitu Universitas Pattimura, SMU Kartika Chandra (SMU Rekonsiliasi) dan SMPN 2 (SMP Rekonsiliasi)
4. Fasilitas olahraga, seperti lapangan sepakbola dan lapangan basket (Lapangan Merdeka)
5. Perkantoran, seperti Kantor Kelurahan, Kantor Kecamatan, Kantor Gubernur, Kantor Walikota dan berbagai instansi pemerintahan lainnya.
6. Perpustakaan Umum (Perpustakaan Wilayah Maluku) sebagai tempat untuk menambah wawasan pengetahuan bagi masyarakat kedua kelompok agama
7. Fasilitas kesehatan berupa rumah sakit sebagai tempat berobat bagi masyarakat kedua kelompok agama (Rumah Sakit Tentara dan Rumah Sakit Umum Dr. Haulussy)
8. Fasilitas rekreasi yang berada di luar lingkungan permukiman, seperti wisata Taman Makam Pahlawan di daerah Kapaha, Tugu Pattimura di Lapangan Merdeka dan Taman Kota Victoria,
9. Terminal atau pangkalan angkutan umum, pelabuhan serta dermaga speedboat yang merupakan ruang pertemuan kedua kelompok agama yang memanfaatkan fasilitas tersebut untuk masuk keluar lokasi penelitian.
10. Fasilitas balai pertemuan (baileo) yang dimanfaatkan sebagai ruang-ruang rapat bersama atau tempat penyelenggaraan upacara adat.

(Lebih jelasnya lihat peta 2. Peta Arahan Konsep Ruang Bersama)



Peta 2.
 Peta Arahan Konsep Ruang Bersama

Rekomendasi

Untuk menunjang keberhasilan konsep ruang bersama ini, maka rekomendasi/usulan yang harus dipertimbangkan adalah:

1. Ruang bersama seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai tempat beraktivitas atas dasar kepentingan ekonomi saja tapi juga menjadi sentra-sentra interaksi yang mengarah pada terciptanya hubungan yang harmoni antar kelompok.
2. Lokasi ruang bersama harus sesuai dengan RTRWP (Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan) serta hasil studi kelayakan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (aksesibel, universalitas dan fungsional).
3. Proses pengadaan, pemanfaatan, dan pemeliharaannya melibatkan masyarakat, investor dan pemerintah (fasilitator) secara terpadu.
4. Hak dan kewajiban yang sama bagi setiap individu, lembaga, atau kelompok yang ada atas ruang bersama tersebut.
5. Perlu mempertimbangkan aspek hukum adat dalam penyelesaian konflik
6. Perlu ada penelitian lebih lanjut mengenai konsep ruang bersama ditinjau dari segi perancangan kota (*urban design*), misalnya tata letak lokasi, luasan tapak, dan sebagainya.
7. Perlu ada pertimbangan terhadap *land consolidation* dan *land readjustment* untuk pembauran kedua kelompok.
8. Seharusnya ada metode analisa tersendiri untuk membahas tentang segregasi akan tetapi karena keterbatasan data maka hal itu tidak bisa dilakukan, sehingga untuk penelitian selanjutnya metode analisa segregasi harus digunakan.
9. Di dalam melakukan penelitian ini, ada 2 (dua) hal yang dijumpai oleh penulis yaitu mengenai zona netral dan kawasan potensi konflik.

1. Zona Netral

Ada lokasi-lokasi tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah kota sebagai zona-zona netral di Kota Ambon, yaitu:

- Kawasan perdagangan dan jasa di Jl. AY Patty, Jl. Anthony Reebok, pasar Mardika, Ambon Plaza, pasar Tagalaya, pasar apung Arumbai.
- Kawasan pendidikan di daerah Mangga Dua yaitu Universitas Pattimura, SMP Rekonsiliasi, dan SMU Rekonsiliasi
- Kawasan perkantoran, kantor gubernur alternatif di daerah Tanah Lapang Kecil, kantor walikota di Jl. Merdeka
- Lapangan Merdeka

Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa:

- Kawasan perdagangan dan jasa tersebut (di Jl. AY Patty, di depan pasar Mardika, Ambon Plaza dan pasar apung Arumbai) hanya dimanfaatkan oleh kelompok Islam sedangkan kelompok Kristen hanya sebagai konsumen dan apabila situasi tidak kondusif, maka kelompok Kristen tidak ada yang melakukan pergerakan ke lokasi tersebut. Demikian halnya dengan pasar Tagalaya yang ditetapkan sebagai zona netral tetapi kenyataannya hanya dipakai berdagang oleh kelompok Kristen.
- Zona-zona transaksi untuk kedua kelompok biasanya dilakukan di Kantor Gubernur, Kantor Kotamadya, Rumah Sakit Tentara, pasar Amans di belakang Hotel Ambon Manise dan pertokoan Planet 2000 di dekat Monumen Trikora.

Pertanyaan untuk penelitian selanjutnya adalah bahwa mengapa kawasan-kawasan yang ditetapkan oleh

pemerintah sebagai zona netral justru tidak semuanya berfungsi sebagaimana mestinya?

Kawasan potensi konflik yang ada di Kota Ambon umumnya di lokasi-lokasi yang berdekatan dengan zona militer, misalnya di perbatasan Batu Merah (Asrama Militer) - Mardika, antara Batu Gajah (Skodam dan Skorem) dan kampung Diponegoro, perbatasan Air Mata Cina - Pohon Puleh yang masih berdekatan dengan zona netral dan zona militer RST.

Pertanyaan untuk penelitian selanjutnya adalah mengapa kawasan-kawasan potensi konflik berada di zona-zona militer dan zona netral?

Daftar Pustaka

- Bardo, John W and Hartman, John J. (1982). *Urban Sociology, A Systematic Introduction*. Wichita State University, USA.
- Coser, Lewis. (1956). *The Functions of Social Conflicts*. Illinois, The Free of Glencoe.
- Setiawan, Hariadi B. (1995). *Arsitektur Lingkungan dan Perilaku*. Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Soerjono Soekanto. (1988). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soulisa, H.A. (1996). *Buku Seri Pela Gandong dari Pulau Ambon*. Ambon: Penerbit Lembaga Kebudayaan Daerah Maluku.
- Susanto, S, Astrid dan Sunarto. (1998). *Masyarakat Indonesia Memasuki Abad ke-Dua Puluh Satu*. Jakarta:Penerbit